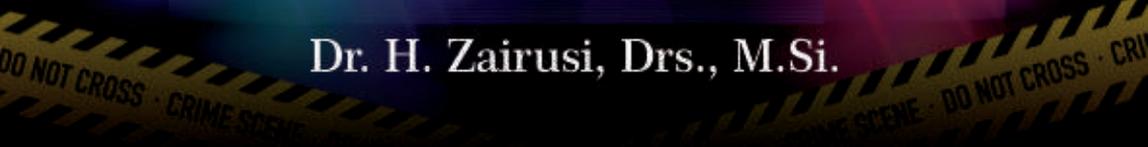




# TRANSPARANSI **PENYIDIK** **KEPOLISIAN**



Dr. H. Zairusi, Drs., M.Si.



## Tentang Penulis



**Dr. H. Zairusi, Drs., M.Si.** dilahirkan di Bintuhan Provinsi Bengkulu, sekolah di Bengkulu, dan berkarir di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dosen di sekolah kepolisian negara, dan selanjutnya menjabat Kepala Kepolisian sektor di 4 (empat) Wilayah, selanjutnya menjabat Kasat Intelejen Keamanan Polres Tasikmalaya, menjabat Kanit Reserse di Polwil Priangan, setelah Perwira menengah menjabat Kanit Reserse Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar. Dan ditugaskan menjabat Kepala Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat. Setelah 3 tahun menjabat kembali sebagai Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Jawa Barat. Dan melaksanakan gelar perkara kasus-kasus menonjol yang menjadi perhatian publik sebagai Pimpinan gelar perkara khusus.

Menjelang akhir pengabdian di Institusi Kepolisian ditugaskan sebagai Dosen Widya Iswara di Sespimpol/Sekolah Pimpinan Polri di Lembang, Jawa Barat. Saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung, Jawa Barat.

# TRANSPARANSI PENYIDIK KEPOLISIAN

Dr. H. Zairusi, Drs., M.Si.



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## TRANSPARANSI PENYIDIK KEPOLISIAN

**Penulis** : Dr. H. Zairusi, Drs., M.Si.

**Editor** : Darmawan Edi Wiyoto, S.Pd., M.Pd.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Herlina Sukma

**ISBN** : 978-623-487-297-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

### REKTOR UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah terwujudnya tulisan ringan yang diuraikan dalam buku *Transparansi Penyidikan Kepolisian*. Meninjau jauh kebelakang tentang program kerja yang telah berjalan pada Kepolisian Republik Indonesia khususnya program jangka panjang tentang reformasi Polri terkait dengan target 3 (tiga) sasaran, yaitu : Reformasi Instrumental, Reformasi Struktural, dan Reformasi Kultural.

Dalam perjalanan untuk mencapai reformasi tersebut diatas sudah berhasil mewujudkan instrumen-instrumen aturan dan payung hukum tugas-tugas kepolisian dengan cukup baik, begitu pula di bidang struktural.

Namun demikian kalau melihat reformasi kepolisian di bidang kultur, sangat belum berhasil dengan indikator masih tingginya *komplain/aduan masyarakat* tentang tidak selesainya kasus-kasus laporan masyarakat yang masih mencapai 2.000 kasus per tahun yang tidak terselesaikan.

Hal lain masih terjadinya perilaku tindak pidana oleh anggota Polri misalnya terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kadiv Propam Polri atas nama Irjen. Pol. Ferdy Sambo terhadap anggota atas nama Brigadir Josua Hutabarat. Kasus yang lain adanya anggota Polri yang masuk jaringan narkoba, baik sebagai penjual barang bukti berupa sabu-sabu yang melibatkan anggota berpangkat brigadir, pejabat Kasat, Kapolres sampai pejabat Kapolda di wilayah kepolisian daerah jambi atas nama Irjen. Pol. Teddy Minahasa Putra. Momok yang bergulir di masyarakat betapa sulitnya mencari keadilan ditengah publik yang mengalami krisis di segala bidang kehidupan, krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, ketauladanan serta krisis kepastian hukum.

Penyidik kepolisian sebagai bagian dari sistem penegak hukum merupakan fungsi kepolisian terdepan yang mengemban tugas dan fungsi tersebut, langsung berinteraksi kepada

kepentingan masyarakat. Baik masyarakat sebagai pelapor atau korban dari permasalahan kasus yang dialami, ataupun sebagai terlapor yang diduga sebagai orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Dengan demikian Penyidik Kepolisian untuk dapat memberi pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat harus dan wajib mengemban komitmen pelayanan masyarakat seperti yang tertulis di Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, sebagai berikut :

Menjunjung tinggi supermasi hukum, dapat menjaga integritas, menunjukkan sikap etika perilaku kepemimpinan yang teladan, taat azas, dapat menangani perkara dengan tuntas, memberikan pelayanan publik yang terbaik, melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan *Stake Holder*, bekerja dengan hati yang ikhlas dan jujur, menerapkan *Reward* dan *Panishman*, berperilaku adil. Komitmen tersebut, seandainya dapat diterapkan dan diaplikasi oleh seluruh aparat penegak hukum dalam bertugas maka untuk menuju masyarakat yang adil dan sejahtera akan tercapai.

Telah dapat diselesaikannya penulisan buku “Transparansi Penyidikan Oleh Penyidik” tersebut, diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi pencapaian harapan publik untuk mewujudkan kepastian hukum masyarakat.

Demikian semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua.

Bandung, 11 Oktober 2022

Rektor, Universitas Langlangbuana



Dr. H. A. R. Harry Anwar, Drs., S.H., M.H.  
Brigjen. Pol. (Purn.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Transparansi Penyidik Kepolisian”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan proses *internal control* bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik) belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga belum dapat memberikan kontribusi terhadap penuntasan penyidikan, pra-penuntutan sampai dengan penyidangan kasus tindak pidana umum secara optimal. Peningkatan kualitas *internal control* bagian wassidik diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses penyidikan yang berlandaskan pada perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas penyidikan, dan menjunjung tinggi etika sebagai penyidik sehingga masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan baik sebagai pelapor maupun dengan posisi sebagai terlapor dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum selama proses penyidikan berjalan sampai dengan penyidangan atau penghentian proses penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya model *internal control* penyidikan pada Bagian Wassidik dalam mewujudkan paradigma baru kepolisian, yaitu sebuah model kerja sama horisontal antara institusi penegak hukum kepolisian dengan penegak hukum atau lembaga terkait lainnya. Sehingga tujuan model kerja sama kolaboratif dapat menyelesaikan persoalan penyidikan yang masih mengalami kendala dalam mencapai target penyidikan, penuntutan dan penyidangan secara efektif.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS LANGLANGBUANA .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 KONSEP MANAJEMEN PUBLIK DAN FUNGSI MANAJEMEN .....</b>	<b>5</b>
A. Konsep Manajemen Publik .....	5
B. Konsep Fungsi Manajemen.....	13
<b>BAB 3 KONSEP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Pengawasan.....	21
B. Konsep Pengendalian.....	37
<b>BAB 4 INTERNAL CONTROL.....</b>	<b>48</b>
A. <i>Controlling</i> .....	48
B. <i>Internal Control</i> .....	50
<b>BAB 5 MODEL INTERNAL CONTROL PADA PENGAWASAN PENYIDIKAN .....</b>	<b>86</b>
A. Aspek Lingkungan Pengendalian .....	86
B. Aspek Penilaian Risiko.....	115
C. Aspek Kegiatan Pengendalian.....	117
D. Aspek Informasi dan Komunikasi.....	136
E. Aspek Pemantauan Pengendalian.....	154
F. Faktor-faktor Penyebab Pengendalian Intern Belum Efektif .....	159
G. Model <i>Internal Control</i> Penyidikan Tindak Pidana Umum .....	165
H. Model Internal Control Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Umum Tingkat Polda .....	175
<b>BAB 6 PENUTUP.....</b>	<b>186</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>194</b>



***TRANSPARANSI PENYIDIK KEPOLISIAN***

Dr. H. Zairusi, Drs., M.Si.



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara hukum menjamin semua warga negaranya sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Polri sebagai institusi Negara yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (*Police as an enforment officer*), kondisi demikian membuat Polri dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar terutama karena sebab kejahatan, diperlukan peran anggota Polri untuk memulihkan keadaan (*restitution in intregumen*) pemaksaagar sipelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya. Sehingga untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan dapat dilihat dari perilaku anggota Polri dalam menjalankan profesinya.

Pada era reformasi Polri semakin dituntut oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat secara profesional, transparan, responsif dan akuntabel (Raharjo,2007).

# BAB 2

## KONSEP MANAJEMEN PUBLIK DAN FUNGSI MANAJEMEN

### A. Konsep Manajemen Publik

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor

# BAB 3

## KONSEP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### A. Konsep Pengawasan

#### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Mc. Farland yang dikutip oleh Handayani (1981:143) yaitu : *Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies.* Pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah dikemukakan.

George R. Terry yang dikutip oleh Sujanto (1996) mengemukakan bahwa *Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the plan.* Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai mengadakan evaluasi atas apa saja yang telah dicapai, dan mengambil tindakan-tindakan korektif apabila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Menurut Manullang (2009:173) pengawasan yaitu: "Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksidengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula". Sedangkan menurut Hani Handoko (2014:357) mengatakan bahwa:

# BAB 4

## INTERNAL CONTROL

### A. *Controlling*

Terminologi *controlling* yang menjadi acuan teori atau pisau analisis pada kajian ini mengandung makna pengawasan atau pengendalian, pengawasan/ kontrol dimana mempunyai fungsi untuk mengendalikan. segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Proses pengawasan sebagai bagian dari pengendalian akan mencatat perkembangan organisasi kearah tujuan yang diharapkan dan memungkinkan pemimpin mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Melalui pengawasan yang efektif, terhadap aktivitas organisasi, maka upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Terry (2014;185) mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengendalian)
2. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
3. *Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan).
4. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

# BAB 5

## MODEL INTERNAL CONTROL PADA PENGAWASAN PENYIDIKAN

### A. Aspek Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian seperti yang dijelaskan oleh Coso, *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's* (Coso,2013) merupakan rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengendalian intern di seluruh organisasi. Peranannya menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal pada organisasi atas pengendalian, serta landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.

Sub-komponen lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika yang dianut organisasi; parameter-parameter yang menjadikan pimpinan organisasi mampu melaksanakan tanggung jawab tata Kelola, pengembangan struktur organisasi. Serta pembagian wewenang dan tanggung jawab,; proses rekrutmen pegawai, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; serta kejelasan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Lingkungan pengendalian yang dihasilkan akan berdampak luas terhadap sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

Dalam konteks standar, proses dan struktur acuan pengendalian penyidikan oleh penyidik kepolisian di berbagai tingkatan organisasi kepolisian, maka KaPolri selaku pimpinan tertinggi di Institusi Kepolisian telah mengeluarkan Peraturan KaPolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

# BAB

# 6

# PENUTUP

Banyak faktor yang menyebabkan proses *internal control* bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik) belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga belum dapat memberikan kontribusi terhadap penuntasan penyidikan, pra-penuntutan sampai dengan penyidangan kasus tindak pidana umum secara optimal. Peningkatan kualitas *internal control* bagian wassidik diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses penyidikan yang berlandaskan pada perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas penyidikan, dan menjunjung tinggi etika sebagai penyidik sehingga masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan baik sebagai pelapor maupun dengan posisi sebagai terlapor dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum selama proses penyidikan berjalan sampai dengan penyidangan atau penghentian proses penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti yang kuat.

Selanjutnya model *internal control* penyidikan pada Bagian Wassidik dalam mewujudkan paradigma baru kepolisian, yaitu sebuah model kerja sama horisontal antara institusi penegak hukum kepolisian dengan penegak hukum atau lembaga terkait lainnya. Sehingga tujuan model kerja sama kolaboratif dapat menyelesaikan persoalan penyidikan yang masih mengalami kendala dalam mencapai target penyidikan, penuntutan dan penyidangan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- A.F. Stoner, James dan Edward Freeman (eds), *Manajemen Jilid I*, terj. Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prahallindo, 1996.
- Anshell and Gash. 2007. *Collaborative governance in Theory and Pratic*, Barkley: University of California. Arens, et al, 2008. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach (Fourteen Edition)*, England: Person Education Limited.
- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: IAPI.
- Arwinge, Olive, 2013. *Internal Control: A Study of Concept and Themes*. Verlag: Springer Heidelberg.
- Bachtiar, Harsja W. (1994) *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Blanchard, Ken & Hersey, Paul, 1995. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa: Agus Dharma, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- COSO, 2013, *Internal Control - Integrated Framework : Executive Summary*, Durham, North Carolina, May 2013
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Denhardt J. V. and R. B. Denhardt, *The New Public Service: Serving, not Steering*, New York, M.E. Shape, 2003
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prectice Hall.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.

- Edward III. (1980). *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Gibson, J. L. (1990). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Griffin, 2004. *Komitmen Organisasi, Terjemahan*, Jakarta: Erlangga
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Gie, T. L. (1989). *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani, 2014. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001. *Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT Indah Karya (Persero) Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Hasibuan, Malayu SP., (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. I. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mazmanian, D. H., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Meter, D. V., & Horn, C. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. London: Sage.

- Moenir. (1995). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1992). *Metode Research*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, R. Z. (2017). *Reformasi Birokrasi Polri Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Barat)* (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Ndraha, T. (2005). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka. Cipta.
- Nugroho, R. D. (2005). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pamudji. (1994). *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik*. Jakarta: Widya Praja.
- Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Qomarudin, M. N., Hasyim, & Herlina. (2015). Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri dalam Pengawasan Internal Terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2).
- Rahardjo, Mudjia (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedurnya*, Malang : Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Nugroho, H. (2013). Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 59-74.

- R.Terry, George. (2006), *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Saefullah. (1999). *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Sumedang: FISIP UNPAD.
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya : Aditya Media Publishing
- Sagala, Syaiful. (2007). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Santoso, P. (2002). *Modul Kuliah Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik dan Otonomi Daerah Program Pascasarjana UGM.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto,Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil*,Jakarta:kompass gramedia.
- Sawyer, Lawrence B. 2005. *Internal Auditing*. Buku Satu. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Schermerhorn, John, 2010. *Management, eleventh Edition*, New York.
- Septi Winarsih, Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shafritz J.M., ott J.S., dan A.C. Hyde, *Public Manajement:The Essential Reading*, Chicago, I,:Lyceum Books/Nelson-Hall Publisher, 1990.
- Sedarmayanti. (2014). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Silalahi, Ulber, 2016. *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Simon, H. A. (1999). *Administrative Behaviour (Perilaku Administrasi)*. Alih Bahasa St. Dianjung. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Soedjadi. (1998). *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Ramadan. Bandung.
- Suyatna, U. (2009). *Kebijakan Publik (Perumusan, Implementasi dan Evaluasi)*. Bandung: Kencana Utama.
- Suwanda, Dadang & Dailibas, 2013. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Jakarta: Penerbit PPM.
- Syafiie, I. K. (2006). *Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tabah, Anton, 2007, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.
- Thoha, M. (1991). *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, B., & Mustopadidjaja, A. R. (1995). *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Wahab, S. A. (2002). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi. 1983. *Azas-azas Manajemen*. Edisi Ketujuh. Penerbit Alumni. Bandung.

Yin, Robert K. (2008). *Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)*. Illinois : Sage Publications, Inc.

## **II. Dokumen Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri. 2008

Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kabareskrim No. 1 Tahun 2014 tentang standar prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana,

Peraturan Kabareskrim No. 2 Tahun 2014 tentang standar prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana,

Peraturan Kabareskrim No. 3 Tahun 2014 tentang standar prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana,

Peraturan Kabareskrim No. 4 Tahun 2014 tentang standar prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana

## **III. Penelitian Terdahulu**

1. Mochammad Nu'aim Qomarudin, Disertasi Universitas Tanjungpura (2015), judul: (Univesitas Brawijaya, 2015) dengan judul "Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri Dalam Pengawasan Internal Terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota).

2. Jufri (2015), Disertasi Universitas Lambung Mangkurat dengan judul: Pengawasan Penyidik POLRI Sebagai Bentuk Perlindungan HAM Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

3. Dwi Budi Murtiono, Disertasi Universitas Diponegoro (2013) dengan judul "Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Polda Kalimantan Barat".
4. Ardi Rahmat (2015), Disertasi Universitas Diponegoro dengan judul "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan". (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru)

## TENTANG PENULIS



**Dr. H. Zairusi, Drs., M.Si.** dilahirkan di Bintuhan Provinsi Bengkulu, sekolah di Bengkulu, dan berkarir di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dosen di sekolah kepolisian negara, dan selanjutnya menjabat Kepala Kepolisian sektor di 4 (empat) Wilayah, selanjutnya menjabat Kasat Intelejen Keamanan Polres Tasikmalaya, menjabat Kanit Reserse di Polwil Priangan, setelah Perwira menengah menjabat Kanit Reserse Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar.

Dan ditugaskan menjabat Kepala Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat. Setelah 3 tahun menjabat kembali sebagai Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Jawa Barat.

Dan melaksanakan gelar perkara kasus-kasus menonjol yang menjadi perhatian publik sebagai Pimpinan gelar perkara khusus.

Menjelang akhir pengabdian di Institusi Kepolisian ditugaskan sebagai Dosen Widya Iswara di Sespimpol/Sekolah Pimpinan Polri di Lembang, Jawa Barat.

Saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung, Jawa Barat.